



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG



LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I TAHUN 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.01.401968

BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

MAHKAMAH AGUNG RI



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG
LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I**

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

**Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran
Pemprov Bangka Belitung**

**Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Telp. 0717-9111513

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG 401968**

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung

Telp. 0717-9111513

PANGKALPINANG - Babel

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 30 Juni 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang. The stamp contains the text "PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	01
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	04
II. Neraca.....	05
III. Laporan Operasional.....	06
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	07
V. Laporan Kinerja.....	08
VI. Catatan atas Laporan Keuangan.....	09
A. Penjelasan Umum.....	09
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.....	09
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
A.3. Basis Akuntansi.....	10
A.4. Dasar Pengukuran.....	10
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	20
B.1. Pendapatan.....	21
B.2. Belanja.....	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	24
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	24
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan.....	24
C.3. Persediaan.....	24
C.4. Tanah.....	24
C.5. Peralatan dan Mesin.....	25
C.6. Gedung dan Bangunan.....	26
C.7. Aset Tetap Lainnya.....	26

C.8.	Akumulasi Penyusutan.....	26
C.9.	Aset Lainnya.....	27
C.10.	Uang Muka dari KPPN.....	27
C.11.	Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang yang Belum Ditagihkan.....	27
C.12.	Ekuitas.....	27
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	28
D.1.	Pendapatan Negara bukan Pajak.....	28
D.2.	Beban Pegawai.....	29
D.3.	Beban Persediaan.....	29
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	30
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	31
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	31
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	32
D.8.	Kegiatan Non Operasional.....	32
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	33
E.1.	Ekuitas Awal.....	33
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	33
E.3.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	33
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	33
E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	34
E.5.	Ekuitas Akhir.....	34
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	35
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	35
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	35
Lampiran-lampiran		

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Provinsi Terpadu, Pangkalpinang - BABEL

Telp. 0717-911151, e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Semester I Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Semester I Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 30 Juni 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Semester I Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0,- dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0,-

Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 2.786.157.769,- atau mencapai 60,70 persen dari alokasi anggaran sebesar 4.589.857.000,-

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022, Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 27.133.329.456,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 42.026.280,- ; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 27.091.303.176,- Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 338.456.549,- Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 26.794.872.907,-. Jumlah Kewajiban

dan Ekuitas sebesar Rp 27.133.329.456,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 3.684.035.640,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 3.684.035.640,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa bernilai Rp 0,- sehingga entitas mengalami surplus (defisit)-LO sebesar (Rp. 3.684.035.640) .

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 27.692.750.778,- dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar (Rp. 3.684.035.640,-), kemudian ditambah dengan Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp. 0,- ditambah Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.786.157.769,- menghasilkan penurunan ekuitas sebesar Rp. 897.877.871,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp. 26.794.872.907,-

5. LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA

Laporan Kinerja Satuan Kerja adalah laporan yang berisi informasi mengenai pencapaian dan kinerja suatu satuan kerja atau unit organisasi dalam periode waktu tertentu. Laporan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana satuan kerja tersebut telah memenuhi target, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengungkapan laporan kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang disajikan untuk melihat hasil kinerja selama semester I tahun anggaran 2025.

6. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian seluruh Laporan keuangan mulai dari Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 (dalam satuan Rupiah)

NO	URAIAN	2025			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0
	PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	0
	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	0
	PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	0	0
B	BELANJA				0
	BELANJA PEGAWAI	2.951.916.000	1.958.367.939	(993.548.061)	66,34
	BELANJA BARANG	1.237.963.000	517.789.830	(720.173.170)	41,83
	BELANJA MODAL	399.978.000	310.000.000	(89.978.000)	77,50
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBANUTANG	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	4.589.857.000.000	2.786.157.769	1.803.699.231	60,70
C	PEMBIAYAAN	0	0	0	0

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NERACA
PER 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	36.000.000	0	36.000.000	0
Persediaan	6.026.280	2.602.450	3.423.830	131,56
JUMLAH ASET LANCAR	42.026.280	2.602.450	39.423.830	1.514,87
ASET TETAP				
Tanah	25,308,000	25,308,000	0	0
Peralatan dan Mesin	7.403.238.407	7.093.238.407	310.000.000	4,37
Gedung dan Bangunan	26,580,019,989	26,580,019,989	0	0
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0
Akumulasi Penyusutan	(6.917.453.220)	(6.004.149.798)	(913.303.422)	15,21
JUMLAH ASET TETAP	27.091.303.176	27.694.606.598	(603.303.422)	(2,18)
Aset Lain-lain	20.290.000	20.290.000	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(20.290.000)	(20.290.000)	0	0
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	27.133.329.456	27.697.209.048	(563.879.592)	(2,04)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	297.391.549	4.458.270	292.933.279	6.570,56
Utang yang belum ditagihkan	5.065.000	0	5.065.000	0
Uang muka dari KPPN	36.000.000	0	36.000.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	338.456.549	4.458.270	333.998.279	7.491,66
JUMLAH KEWAJIBAN	338.456.549	4.458.270	333.998.279	7.491,66
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	26.794.872.907	27.692.750.778	(897.877.871)	(3,24)
JUMLAH EKUITAS	26.794.872.907	27.692.750.778	(897.877.871)	(3,24)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	27.133.329.456	27.697.209.048	(563.879.592)	(3,24)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG LAPORAN OPERASIONAL PER 30 Juni 2025 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	2.192.019.662	1,580,368,352	611.651.310	38,703
Beban Persediaan	15.514.890	9,383,900	6.130.990	65,335
Beban Barang dan Jasa	339.506.500	319,884,400	19.622.100	6,134
Beban Pemeliharaan	185.862.156	189,632,029	(3.769.873)	(1,988)
Beban Perjalanan Dinas	37.829.010	69,433,110	(31.604.100)	(45,517)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	913.303.422	893,614,663	19.688.759	(2,203)
JUMLAH BEBAN	3.684.035.640	3,062,316,454	621.719.186	20,302
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3.684.035.640)	(3,062,316,454)	(621.719.186)	20,302
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0		0	

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.684.035.640)	(3.062.316.454)	(621.719.186)	20,302
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT – LO	(3.684.035.640)	(3.062.316.454)	(621.719.186)	20,302

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA PANGKALPINANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 30 Juni 2025

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	27.692.750.778	29,468,950,981	(1.776.200.203)	(6,03)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3.684.035.640)	(3,062,316,454)	(621.719.186)	20,3
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	401,037	(401,037)	(100)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	401,037	(401,037)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2.786.157.769	1,977,858,208	808.299.561	40,87
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(897.877.871)	(1,084,057,209)	186.179.338	(17,17)
EKUITAS AKHIR	26.794.872.907	28,384,893,772	(1.590.020.865)	(5,6)

(dalam satuan Rupiah)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. LAPORAN KINERJA

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung
 Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
 Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
 Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : Peradilan
 Program : Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : Kep. Bangka Belitung

Kode	Rincian Output	Belanja			Output				Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
005.01.WA.1 071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	399.978.000	310.000.000	77,50	4	1	Unit	78	
005.01.WA.6 986.EBA.962	Layanan Umum	700,000	650.000	92,86	1	1	Laporan	100	
005.01.WA.6 986.EBA.994	Layanan Perkantoran	4.019.709.000	2,475,948,054	56,27	1	0	Layanan	51,32	
005.01.WA.6 986.EBA.953	Layanan pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100	1	1	Dokumen	100	
	Total	4.420.687.000							

VI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terletak di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien .
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu Rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari Modul Akutansi dan Pelaporan dan Modul Aset Tetap SAKTI. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset Tetap SAKTI adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan PENDAPATAN bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumberpendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan PENDAPATAN bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (*revaluasi*) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 September 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai

Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan),

dan kas yang dibatasi penggunaannya. KM.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan 6 (enam) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut:

1. **Revisi I** tanggal 7 Januari 2025 berupa Revisi Pemutakhiran KPA Terkait Akun Tunjangan Pejabat Negara Pada Belanja Pegawai.
2. **Revisi II** tanggal 23 Februari 2025 berupa Revisi Hal. III DIPA Terkait Rencana Penarikan Dana Triwulan I (Januari-Maret) dan Revisi Efisiensi Anggaran TA 2025.
3. **Revisi III** tanggal 23 Maret 2025 berupa Revisi Buka Blokir Efisiensi Anggaran TA 2025.
4. **Revisi IV** tanggal 21 April 2025 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni) dan Pemutakhiran POK.
5. **Revisi V** tanggal 28 Mei 2025 berupa Revisi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Belanja Pegawai.
6. **Revisi VI** tanggal 21 Juni 2025 tentang Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas dan Revisi POK Belanja Pegawai.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
PENDAPATAN Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	2.782.746.000	2.951.916.000
Belanja Barang	1.237.963.000	1.237.963.000
Belanja Modal	399.978.000	399.978.000
Jumlah Belanja	4,420.687.000	4.589.857.000

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan
Rp. 0

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir dari pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 0,-

No.	Uraian	2025		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	0	0	0
2.	PENDAPATAN Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu	0	0	0
3.	PENDAPATAN Kembali Persekot/Uang Muka Gaji.	0	0	0
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
Total Pendapatan		0	0	0

Rincian Estimasi dan Realisasi PNB
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025

No.	Uraian	TA 2025	TA 2022	Naik (Turun) %
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	0	0	0
2.	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji.	0	0	0
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
Total Pendapatan		0	0	0

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara :
Rp2.786.157.769

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 2.786.157.769,- atau sebesar 60,7% dari anggaran senilai Rp. 4.589.857.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2025 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025

Uraian	2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.951.916.000	1.959.108.224	66,34
Belanja Barang	1.237.963.000	517.789.830	41,83
Belanja Modal	399.978.000	310.000.000	77,50
Total Belanja Bruto	4.589.857.000	2.786.898.054	60,7
Pengembalian Belanja	0	740.285	-
Total Belanja Netto	4.589.857.000	2.786.157.769	60,7

Dibandingkan dengan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024, yakni sebesar Rp 1.977.858.208,- yang menyerap 50,4% anggaran dari total PAGU Rp 3.924.182.000,-, Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan persentase penyerapan anggaran sebesar 10,3%. Kenaikan ini disebabkan perubahan PAGU yang juga signifikan, yakni dari angka Rp 3.924.182.000 pada TA 2024 menjadi Rp 4.589.857.000 di TA 2025. Perubahan PAGU anggaran ini disebabkan penambahan di anggaran belanja pegawai dan belanja modal.

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai :
Rp. 1.958.367.939*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 1.958.367.939,- yang terdiri dari belanja pegawai bruto Rp. 1.959.108.224,- dan pengembalian belanja sebesar Rp. 740.285,- . Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang :
Rp. 517.789.830*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 517.789.830,-

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 36.000.000

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp. 36.000.000,- Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2025

Uraian	TA 2025
Uang Tunai di Brankas	291.144
Uang di Bank	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	35.708.856
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	36.000.000

Kas di Bendahara
Penerimaan:
Rp 0

Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni TA 2025

Uraian	TA 2025
Uang Tunai di Brankas	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	0

C.2. Persediaan

Persediaan:
Rp 6.026.280

Persediaan per 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp. 6.026.280,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Per 30 Juni TA 2025

Uraian	TA 2025
Barang Konsumsi	5,405,680
Bahan Untuk Pemeliharaan	620,600
Total	6.026.280

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan berita acara stock opname fisik .

C.3. Tanah

Tanah
Rp. 25.308.000

Tanah merupakan aset tetap berwujud yang diperoleh dalam kondisi siap pakai atau juga disempurnakan terlebih dahulu sampai siap pakai untuk operasional kantor. Tanah memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan tidak diperjualbelikan dalam jalannya kegiatan kantor. Aset tetap berupa tanah dalam akuntansi dinilai berdasarkan harga perolehan. Tanah Per 30 Juni 2025 disajikan senilai Rp 25.308.000,-.

C.4. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp. 7.403.238.407

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2025 adalah Rp.7.403.238.407,- dengan nilai buku sebesar Rp 2,329,827,324,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	7.093.238.407
Mutasi Tambah	310.000.000
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Pembelian	310.000.000
Mutasi Kurang	0
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2025	7.403.238.407
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	(5.073.411.083)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	2,329,827,324

*Gedung dan
Bangunan
Rp.26.580.019.989*

C.5. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang disajikan sebesar Rp 26,580,019,989,- dengan akumulasi penyusutan senilai Rp 1.844.042.137,- sehingga nilai buku menjadi sebesar Rp 24,735,977,852,-. Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diperoleh dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2022. Nilai gedung dan bangunan berasal dari segala pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya perencanaan, konstruksi, pengawasan, dan biaya administrasi lain-lain.

C.6. Aset Tetap Lainnya

*Aset tetap
lainnya
Rp.190.000*

Aset Tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca.

Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset. Aset tetap lainnya disajikan sebesar Rp 190.000,- yang merupakan 2 buah monografi.

C.7. Akumulasi Penyusutan

*Akumulasi
Penyusutan
Rp.6.917.453.220*

Saldo Akumulasi Penyusutan Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp (6.917.453.220,-) yang terdiri dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp 5.073.411.083,- dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp 1,844,042,137,-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Aset lainnya
Rp.0

C.8 Aset Lainnya

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap dan Aset Lainnya yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Aset lain-lain Per 30 Juni 2025 disajikan sebesar Rp 20.290.000,- merupakan kumpulan dari peralatan dan mesin berupa mesin absensi senilai Rp 6.100.000,-, kursi besi/metal senilai Rp 4.200.000,-, PC senilai Rp 9.990.000,- yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat. Aset ini bernilai buku Rp 0,- setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 20.290.000,-.

C.8. Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari
KPPN
Rp.36.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 36.000.000,- Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.9. Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang yang Belum Ditagihkan

Utang kepada
pihak Ketiga
Rp.297.391.549

Saldo utang kepada pihak ketiga Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 297.391.549,- yang merupakan gaji pegawai Bulan Juli 2025 sebesar Rp 237,628,693 dan beban barang yang masih harus dibayar bulan Juli 2025 senilai Rp 59,762,856,- yang belum terbit SP2D. Sedangkan utang yang belum ditagihkan senilai Rp 5.065.000,-

C.10. Ekuitas

Ekuitas:
Rp 26.794.872.907,-

Ekuitas per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 26.794.872.907,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp.0*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah Rp. 0

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025

Uraian	TA 2025	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0
Total Pendapatan	0	0

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp. 2.192.019.662,

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.2.192.019.662,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2025

Uraian	TA 2025
Beban Gaji Pokok PNS	648,945,240
Beban Pembulatan Gaji PNS	9,084
Pengembalian B. Pembulatan	-285
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	33,452,010
Beban Tunj. Anak PNS	7,988,606
Beban Tunj. Struktural PNS	25,920,000
Beban Tunj. Fungsional PNS	32,460,000
Pengembalian Tunj. Fungsional PNS	
Beban Tunj. PPh PNS	4,748,299
Pengembalian Tunj. PPh PNS	0
Beban Tunj. Beras PNS	25,709,100
Beban Uang Makan PNS	59,231,000
Beban Tunjangan Umum PNS	6,430,000
Pengembalian B. Tunjangan Umum PNS	-740,000
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	47,250,000
Pengembalian Tunjangan Kemahalan Hakim	0
Beban Tunjangan PPh Pejabat Negara	215,816,608
Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,084,800,000
Total Beban Pegawai	2.192.019.662

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan :
Rp 15.514.890

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 sebesar Rp 15.514.890,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2025

Uraian	TA 2025
Beban Persediaan Konsumsi	15.514.890
Total Beban Persediaan	15.514.890

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :
Rp.339.506.500,-*

Jumlah Beban Jasa per 30 Juni TA 2025 sebesar Rp. 339.506.500,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya meningkatnya kebutuhan biaya operasional perkantoran, beban langganan listrik dan beban jasa lainnya.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025

Uraian	TA 2025
Beban Keperluan Perkantoran	279,001,100
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	402,600
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	21,750,000
Beban Bahan	300,000
Beban Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	650,000
Beban Langganan Telepon	2,162,800
Beban Sewa	35,240,000
Total Beban Barang dan Jasa	339.506.500

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp 185.862.156,-

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 185.862.156,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan beban pemeliharaan karena adanya kenaikan pada pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya.

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025

Uraian	TA 2025
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	129,401,256
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54,116,3506
Beban Bahan Persediaan untuk Pemeliharaan	2,344,550
Total Beban Pemeliharaan	185.862.156

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas :
Rp.37.829.010

Beban Perjalanan Dinas untuk Semester I TA 2025 sebesar Rp. 37.829.010,- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025

Uraian	TA 2025
Beban Perjalanan Biasa	37.829.010
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0
Total Beban Perjalanan Dinas	37.829.010

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi :
Rp. 913.303.422,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2025 sebesar Rp.913.303.422,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025

Uraian	TA 2025
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	647,467,469
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	265,835,953
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	913.303.422

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Rp.0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2025

Uraian	TA 2025
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp.27.692.750.778,-*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp. 27.692.750.778,-

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit) LO
: (Rp 3.684.035.640,-)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar (Rp. 3.684.035.640,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi:
Rp 0*

Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0.

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Koreksi Antar
Entitas :
Rp2.786.157.769,-*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 2.786.157.769,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.786.157.769
Diterima Dari Entitas Lain	0
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	2.786.157.769

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp. 0,- sedangkan DKEL sebesar Rp.2.786.157.769 ,-

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir :
Rp.26.794.872.907,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 26.794.872.907,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Pengungkapan atas Belanja Penanganan Pandemi Covid-19

Tidak ada PAGU Belanja penanganan Pandemi Covid-19 pada Semester I TA 2025.

F.2.2. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK baik di Tahun Anggaran 2025 maupun Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan dijelaskan pada laporan keuangan Tahunan Tahun 2025.

F.2.4. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah :

1. BRI Cab. Pangkalpinang A/C 653244019681000 a.n. BPG 015 PTUN PKP yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp.0.
2. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 651554034291000 a.n. BPG 015 PTUN PKP 403429 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp.0.
3. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 0063-01-002185-30-7 a.n. RPL 015 PDT PTUN PKP UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp 3.055.420,-

F.2.5. Revisi DIPA

Pada periode Laporan Keuangan Semester I 2025 terdapat 6 (enam) Revisi DIPA yaitu:

1. **Revisi I** tanggal 7 Januari 2025 berupa Revisi Pemutakhiran KPA Terkait Akun Tunjangan Pejabat Negara Pada Belanja Pegawai.
2. **Revisi II** tanggal 23 Februari 2025 berupa Revisi Hal. III DIPA Terkait Rencana Penarikan Dana Triwulan I (Januari-Maret) dan Revisi Efisiensi Anggaran TA 2025.
3. **Revisi III** tanggal 23 Maret 2025 berupa Revisi Buka Blokir Efisiensi Anggaran TA 2025.
4. **Revisi IV** tanggal 21 April 2025 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni) dan Pemutakhiran POK.
5. **Revisi V** tanggal 28 Mei 2025 berupa Revisi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Belanja Pegawai.
6. **Revisi VI** tanggal 21 Juni 2025 tentang Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas dan Revisi POK Belanja Pegawai.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode Laporan Keuangan Semester I 2025 terdapat ralat SPM untuk pembayaran SPM gaji pejabat negara

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang dapat dijabarkan pada laporan keuangan Semester I Tahun 2025 ini.

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 28/07/25 1:09 PM

Tgl Cetak : 28/07/25 4:40 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	36,000,000	0	36,000,000	0.00
Persediaan	6,026,280	2,602,450	3,423,830	131.56
JUMLAH ASET LANCAR	42,026,280	2,602,450	39,423,830	1,514.87
ASET TETAP				
Tanah	25,308,000	25,308,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	7,403,238,407	7,093,238,407	310,000,000	4.37
Gedung dan Bangunan	26,580,019,989	26,580,019,989	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,917,453,220)	(6,004,149,798)	(913,303,422)	15.21
JUMLAH ASET TETAP	27,091,303,176	27,694,606,598	(603,303,422)	(2.18)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	20,290,000	20,290,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(20,290,000)	(20,290,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	27,133,329,456	27,697,209,048	(563,879,592)	(2.04)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	297,391,549	4,458,270	292,933,279	6,570.56
Utang Yang Belum Ditagihkan	5,065,000	0	5,065,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	36,000,000	0	36,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	338,456,549	4,458,270	333,998,279	7,491.66
JUMLAH KEWAJIBAN	338,456,549	4,458,270	333,998,279	7,491.66
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	26,794,872,907	27,692,750,778	(897,877,871)	(3.24)
JUMLAH EKUITAS	26,794,872,907	27,692,750,778	(897,877,871)	(3.24)
JUMLAH EKUITAS	26,794,872,907	27,692,750,778	(897,877,871)	(3.24)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	27,133,329,456	27,697,209,048	(563,879,592)	(2.04)

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 28 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DORA NATALIA SINGARIMBUN

NIP 198112292006042015



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UNIT ORGANISASI **: 01** **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI **: 3000** **BANGKA BELITUNG**
SATUAN KERJA **: 401968** **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG**

Tgl. Cetak 28/07/2025 4:42 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,174,800	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	427,650	0
0.0	131111	Tanah	25,308,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,093,238,407	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	26,580,019,989	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	190,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,425,943,614
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,578,206,184
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	20,290,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	20,290,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	3,976,970
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	481,300
0.0	391111	Ekuitas	0	27,692,750,778
JUMLAH			33,721,648,846	33,721,648,846

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 28/07/25 12:25 PM

Tgl Cetak : 28/07/25 4:40 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	27,692,750,778	29,468,950,981	(1,776,200,203)	(6.03)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,684,035,640)	(3,062,316,454)	(621,719,186)	20.3
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	401,037	(401,037)	(100)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	401,037	(401,037)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,786,157,769	1,977,858,208	808,299,561	40.87
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(897,877,871)	(1,084,057,209)	186,179,338	(17.17)
EKUITAS AKHIR	26,794,872,907	28,384,893,772	(1,590,020,865)	(5.6)

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 28 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DORA NATALIA SINGARIMBUN

NIP 198112292006042015

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 28/07/25 1:09 PM
Tgl Cetak : 28/07/25 4:40 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,192,019,662	1,580,368,352	611,651,310	38.703
Beban Persediaan	15,514,890	9,383,900	6,130,990	65.335
Beban Barang dan Jasa	339,506,500	319,884,400	19,622,100	6.134
Beban Pemeliharaan	185,862,156	189,632,029	(3,769,873)	(1.988)
Beban Perjalanan Dinas	37,829,010	69,433,110	(31,604,100)	(45.517)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
 SATUAN KERJA : (401968) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 28/07/25 1:09 PM

Tgl Cetak : 28/07/25 4:40 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	913,303,422	893,614,663	19,688,759	2.203
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,684,035,640	3,062,316,454	621,719,186	20.302
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,684,035,640)	(3,062,316,454)	(621,719,186)	20.302
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,684,035,640)	(3,062,316,454)	(621,719,186)	20.302
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,684,035,640)	(3,062,316,454)	(621,719,186)	20.302

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 28 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DORA NATALIA SINGARIMBUN

NIP 198112292006042015

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Tanggal	: 28/07/25 4:42 PM
WILAYAH/PROVINSI	: 3000	BANGKA BELITUNG	Halaman	: 1
SATUAN KERJA	: 401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	Prig ID	: lap_lra_bel_akun_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data	: 28/7/25 2:21 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		649,111,000	572,513,620	0	572,513,620	88.2	76,597,380
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	905,080,000	16,000	8,322	285	8,037	50.23	7,963
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	90,509,000	33,460,000	29,713,300	0	29,713,300	88.8	3,746,700
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13,748,000	7,991,000	7,095,604	0	7,095,604	88.79	895,396
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	40,320,000	25,920,000	23,040,000	0	23,040,000	88.89	2,880,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,225,840,000	35,460,000	31,520,000	0	31,520,000	88.89	3,940,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	215,784,000	5,638,000	5,528,148	0	5,528,148	98.05	109,852
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	36,695,000	25,710,000	22,739,880	0	22,739,880	88.45	2,970,120
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	166,056,000	95,000,000	59,231,000	0	59,231,000	62.35	35,769,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	7,700,000	6,430,000	5,510,000	740,000	4,770,000	74.18	1,660,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	81,000,000	64,800,000	40,500,000	0	40,500,000	62.5	24,300,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,782,746,000	949,536,000	797,399,874	740,285	796,659,589	83.9	152,876,411
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara		295,818,000	197,108,350	0	197,108,350	66.63	98,709,650
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	1,706,562,000	964,600,000	0	964,600,000	56.52	741,962,000
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	2,002,380,000	1,161,708,350	0	1,161,708,350	58.02	840,671,650
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 51	2,782,746,000	2,951,916,000	1,959,108,224	740,285	1,958,367,939	66.34	993,548,061
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional		555,324,000	253,118,100	0	253,118,100	45.58	302,205,900
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	555,189,000	6,000,000	431,600	0	431,600	7.19	5,568,400
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,000,000	52,200,000	17,400,000	0	17,400,000	33.33	34,800,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	48,600,000	613,524,000	270,949,700	0	270,949,700	44.16	342,574,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	609,789,000						
5212	Belanja Barang Non Operasional		300,000	300,000	0	300,000	100	0
521211	Belanja Bahan	300,000	700,000	650,000	0	650,000	92.86	50,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomplabel	700,000	1,000,000	950,000	0	950,000	95	50,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,000,000						
5218	Belanja Barang Persediaan		51,237,000	18,938,170	0	18,938,170	36.96	32,298,830
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	54,272,000	51,237,000	18,938,170	0	18,938,170	36.96	32,298,830
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	54,272,000						
5221	Belanja Jasa		6,000,000	2,158,400	0	2,158,400	35.97	3,841,600
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000						

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Tanggal	: 28/07/25 4:42 PM
WILAYAH/PROVINSI	: 3000	BANGKA BELITUNG	Halaman	: 2
SATUAN KERJA	: 401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	Prig ID	: lap_lra_bel_akun_salker_poc
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data	: 28/7/25 2:21 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522141	Belanja Sewa	50,360,000	50,360,000	35,240,000	0	35,240,000	69.98	15,120,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	56,360,000	56,360,000	37,398,400	0	37,398,400	66.36	18,961,600
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190,662,000	195,661,000	108,611,500	0	108,611,500	55.51	87,049,500
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	248,660,000	243,661,000	43,113,050	0	43,113,050	17.69	200,547,950
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	439,322,000	439,322,000	151,724,550	0	151,724,550	34.54	287,597,450
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,220,000	75,880,000	37,189,010	0	37,189,010	49.01	38,690,990
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	640,000	640,000	0	640,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	77,220,000	76,520,000	37,829,010	0	37,829,010	49.44	38,690,990
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,237,963,000	1,237,963,000	517,789,830	0	517,789,830	41.83	720,173,170
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	399,978,000	399,978,000	310,000,000	0	310,000,000	77.5	89,978,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	399,978,000	399,978,000	310,000,000	0	310,000,000	77.5	89,978,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	399,978,000	399,978,000	310,000,000	0	310,000,000	77.5	89,978,000
	JUMLAH BELANJA	4,420,687,000	4,589,857,000	2,786,898,054	740,285	2,786,157,769	60.7	1,803,699,231

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 401968
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 28/07/25 4:44 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 28/7/25 2:21 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	905,080,000	649,111,000	572,513,620	0	572,513,620	88.2	76,597,380
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	14,000	16,000	8,322	285	8,037	50.23	7,963
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	90,509,000	33,460,000	29,713,300	0	29,713,300	88.8	3,746,700
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13,748,000	7,991,000	7,095,604	0	7,095,604	88.79	895,396
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	40,320,000	25,920,000	23,040,000	0	23,040,000	88.89	2,880,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,225,840,000	35,460,000	31,520,000	0	31,520,000	88.89	3,940,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	215,784,000	5,638,000	5,528,148	0	5,528,148	98.05	109,852
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	36,695,000	25,710,000	22,739,880	0	22,739,880	88.45	2,970,120
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	166,056,000	95,000,000	59,231,000	0	59,231,000	62.35	35,769,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	7,700,000	6,430,000	5,510,000	740,000	4,770,000	74.18	1,660,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	81,000,000	64,800,000	40,500,000	0	40,500,000	62.5	24,300,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,782,746,000	949,536,000	797,399,874	740,285	796,659,589	83.9	152,876,411
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	295,818,000	197,108,350	0	197,108,350	66.63	98,709,650
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	1,706,562,000	964,600,000	0	964,600,000	56.52	741,962,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	0	2,002,380,000	1,161,708,350	0	1,161,708,350	58.02	840,671,650
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,782,746,000	2,951,916,000	1,959,108,224	740,285	1,958,367,939	66.34	993,548,061
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	555,189,000	555,324,000	253,118,100	0	253,118,100	45.58	302,205,900
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,000,000	6,000,000	431,600	0	431,600	7.19	5,568,400
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	48,600,000	52,200,000	17,400,000	0	17,400,000	33.33	34,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	609,789,000	613,524,000	270,949,700	0	270,949,700	44.16	342,574,300
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	700,000	650,000	0	650,000	92.86	50,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,000,000	1,000,000	950,000	0	950,000	95	50,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	54,272,000	51,237,000	18,938,170	0	18,938,170	36.96	32,298,830
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	54,272,000	51,237,000	18,938,170	0	18,938,170	36.96	32,298,830
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	6,000,000	2,158,400	0	2,158,400	35.97	3,841,600

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 401968
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 28/07/25 4:44 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_salker_poc
Tgl Data : 28/7/25 2:21 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522141	Belanja Sewa	50,360,000	50,360,000	35,240,000	0	35,240,000	69.98	15,120,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	56,360,000	56,360,000	37,398,400	0	37,398,400	66.36	18,961,600
5231	Belanja Pemeliharaan	190,662,000	195,661,000	108,611,500	0	108,611,500	55.51	87,049,500
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	248,660,000	243,661,000	43,113,050	0	43,113,050	17.69	200,547,950
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	439,322,000	439,322,000	151,724,550	0	151,724,550	34.54	287,597,450
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	77,220,000	75,880,000	37,189,010	0	37,189,010	49.01	38,690,990
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	640,000	640,000	0	640,000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	77,220,000	76,520,000	37,829,010	0	37,829,010	49.44	38,690,990
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241							
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,237,963,000	1,237,963,000	517,789,830	0	517,789,830	41.83	720,173,170
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	399,978,000	399,978,000	310,000,000	0	310,000,000	77.5	89,978,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	399,978,000	399,978,000	310,000,000	0	310,000,000	77.5	89,978,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321							
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	399,978,000	399,978,000	310,000,000	0	310,000,000	77.5	89,978,000
	JUMLAH BELANJA	4,420,687,000	4,589,857,000	2,786,898,054	740,285	2,786,157,769	60.7	1,803,699,231

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 401968

Tgl Data : 28/07/25 1:09 PM
Tgl Cetak : 28/07/25 4:40 PM
Halaman : 1
lap_irra_face_salker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	4,589,857,000	2,786,157,769	(1,803,699,231)	60.70	3,924,182,000	1,977,858,208	(1,946,323,792)	50.4
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,951,916,000	1,958,367,939	(993,548,061)	66.34	2,839,679,000	1,426,087,869	(1,413,591,131)	50.22
1. Belanja Pegawai	1,237,963,000	517,789,830	(720,173,170)	41.83	1,084,503,000	551,770,339	(532,732,661)	50.88
2. Belanja Barang	399,978,000	310,000,000	(89,978,000)	77.50	0	0	0	0
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 401968

Tgl Data : 28/07/25 1:09 PM
Tgl Cetak : 28/07/25 4:40 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Olonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,589,857,000	2,786,157,769	(1,803,699,231)	60.70	3,924,182,000	1,977,858,208	(1,946,323,792)	50.4
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 28 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015

RINCIAN NILAI KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 30 JUNI 2025

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : BANGKA BELITUNG

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2025				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	BANGKA BELITUNG	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG	Rp -	-	-	Rp -	
JUMLAH					-	-	-	-	

Pangkalpinang, 30 JUNI 2025
Sekretaris



Dora Natalia Singarimbun
NIP.198112292006042015



RINCIAN NILAI KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 30 JUNI 2025

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : BANGKA BELITUNG

					SALDO PER 30 JUNI 2025				Keterangan
NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	BANGKA BELITUNG	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG	Rp -	Rp -	-	Rp -	
JUMLAH					-	-	-	-	

Pangkalpinang, 30 JUNI 2025
Sekretaris



Dora Natalia Singarimbun
NIP.198112292006042015

RINCIAN SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 30 JUNI 2025

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2025				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	BANGKA BELITUNG	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG	Rp -	-	-	Rp -	
JUMLAH					-	-	-	-	

Pangkalpinang, 30 JUNI 2025
Sekretaris


Dora Natalia Singarimbun
NIP.198112292006042015

RINCIAN NILAI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 30 JUNI 2025

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2025				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	Bangka Belitung	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG	Rp 291.200	Rp -	-	Rp 291.200	Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp. 291.200
								Rp 35.708.856	Kuitansi UP
								Rp 56	Selisih karena Kesulitan Mencari pecahan
				JUMLAH				Rp 36.000.000	Jumlah UP

Pangkalpinang, 30 Juni 2025
Sekretaris



Dora Natalia Singarimbun
NIP.198112292006042015

SATKER : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

WILAYAH BANGKA BELITUNG

RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 Juni 2025

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2023															
No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	No. KDP	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp) Murni/Pinjaman	Uang Muka	Retensi	Keterangan		
													Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
NIHIL															

Pangkalpinang, 30 Juni 2025
Sekretaris



Dora Natalia Singarimbun
NIP.198112292006042015

DAFTAR MONITORING PENUTUPAN REKENING
PERIODE 30 JUNI 2025

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	TANGGAL PENUTUPAN	ALASAN PENUTUPAN
1	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG	005	01	-	-	-	-	-	-

Pangkalpinang, 30 Juni 2025
Sekretaris

Dora Natalia Singarimbun
NIP.198112292006042015


RENCANA TINDAK LANJUT
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			RENCANA TINDAK LANJUT	JADWAL PENYELESAIAN
		I	II	III		
-	-	-	-	-	-	-

Pangkalpinang, 30 Juni 2025
Sekretaris



Dora Natalia Singarimbun

NIP.198112292006042015

MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	TAHUN ANGGARAN	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	3000	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG	2025	-	-	-	-	-

Pangkalpinang, 30 Juni 2025
Sekretaris

Dora Natalia Singarimbun



BERITA ACARA KONFIRMASI HIBAH DALAM NEGERI MAHKAMAH AGUNG DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
UNTUK BULAN JANUARI S.D JUNI 2025

NO	NOMOR REGISTER	NAMA PROJECT	MAHKAMAH AGUNG RI														KEMENTERIAN KEUANGAN RI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			SATUAN KERJA			PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/MPHLBJS)											PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/MPHLBJS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						TANGGAL PENGESAHAN HIBAH			UANG			BARANG/JASA			TANGGAL PENGESAHAN HIBAH			UANG			BARANG/JASA			KET			TANGGAL PENGESAHAN HIBAH			UANG			BARANG/JASA			KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			BA	ES	KODE SATKER				MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR				MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR				MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR				MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR	MATA UANG	VALAS	IDR

Pangkalpinang, 30 Juni 2025
Sekretaris


DORA NATALIA SINGARIMBUN

DATA REKENING BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA DIPA 01
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT IJIN	STATU S TNP	SALDO PER 30 Juni 2025
1	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG	005	01	VIRTUAL ACC	653244019681000	BPG 015 PTUN PKP	BRI	S- 2732/WPB.12/KP.06/2020	TNP	Rp -

Pangkalpinang, 30 Juni 2025
Sekretaris



Dora Natalia Singarimbun
NIP.198112292006042015

RINCIAN SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
Per 30 Juni 2025

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
SATKER : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 Juni 2025				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	BANGKA BELITUNG	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG	Rp -	Rp -	-	Rp -	-
JUMLAH					Rp -	Rp -	-	Rp -	-

Pangkalpinang, 30 Juni 2025
Sekretaris



Dora Natalia Singarimbun
NIP. 198112292006042015



RINCIAN NILAI KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH : 3000 BANGKA BELITUNG
SATKER : 401968 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2025				Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
1	3000	BANGKA BELITUNG	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG	Rp	-	-	Rp	-
JUMLAH					Rp	-	Rp	-	-

Pangkalpinang, 30 Juni 2025
Sekretaris

Dora Natalia Singarimbun
NIP.198112292006042015